

Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi

Hilda Azalia David Mulyono¹

Surya Raharja²

^{1,2}Departemen Akuntansi Universitas Diponegoro, Indonesia

*Correspondences: hildaazaliadavidm@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menekan korupsi. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menerapkan mekanisme kebijakan anti korupsi. Tujuan penelitian ini untuk menguji kembali faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Variabel tersebut yaitu keberadaan komite tata kelola, tipe industri dan ukuran perusahaan. Populasi berupa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021, dengan total sampel sebanyak 2.230 data observasi. Metode penelitian yaitu kuantitatif. Analisis yang digunakan yaitu PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan pengujian statistik memperlihatkan keberadaan komite tata kelola, tipe industri, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi; Tata Kelola Perusahaan; Karakteristik Perusahaan.

Determinants of Disclosure of Anti-Corruption Policy

ABSTRACT

Various efforts have been made to prevent and suppress corruption. One of these efforts is by implementing an anti-corruption policy mechanism. The purpose of this study is to re-examine the factors that are thought to influence the disclosure of anti-corruption policies. These variables are the existence of a governance committee, type of industry and company size. The population is public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2017-2021, with a total sample of 2,230 observation data. The research method is quantitative. The analysis used is PLS-SEM. The results of the study show that statistical tests show that the existence of a governance committee, type of industry, and company size have a positive influence on disclosing anti-corruption policies.

Keywords: *Corruption; Disclosure of Anti-Corruption Policy; Corporate Governance; Company Characteristics.*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 2
Denpasar, 26 Februari 2023
Hal. 515-528

DOI:
[10.24843/EJA.2023.v33.i02.p16](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p16)

PENGUTIPAN:
Mulyono, H. A. D., &
Raharja, S. (2023).
Determinan Pengungkapan
Kebijakan Anti Korupsi. *E-
Jurnal Akuntansi*, 33(2),
515-528

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
8 Desember 2022
Artikel Diterima:
12 Februari 2023

PENDAHULUAN

Korupsi termasuk ke dalam tindak pidana yang melanggar hukum. Tindakan tidak etis ini memiliki motif utama yaitu memperkaya diri sendiri atau memperkaya suatu kelompok yang menyebabkan kerugian pada pihak lain (KPK, 2022). Indonesia sebagai negara berkembang juga dihadapkan pada masalah korupsi. Korupsi dapat terjadi di sektor negeri maupun swasta. Menurut (KPK, 2019) kasus korupsi yang melibatkan swasta dan terjadi dari tahun 2004 hingga 2019 yaitu sebesar 287 dari 1125 kasus. Keterlibatan sektor swasta sering kali diakibatkan oleh kepentingan bisnis saat berinteraksi dengan para birokrat, terutama ketika berkaitan dengan proses perizinan.

Kasus korupsi terbaru yang ditemukan di tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi di PT Waskita Karya. Kasus tersebut berkaitan dengan adanya pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif di sejumlah proyek yang dijalankan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya dari 2009 hingga 2015. Kasus di Waskita Karya ini menjadi bukti bahwa perusahaan dari sektor negeri pun juga terlibat kasus korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi telah menarik perhatian para peneliti akuntansi untuk berupaya menemukan determinan dari pencegahan korupsi. Menurut aktivis *Indonesian Corruption Watch (ICW)* masalah korupsi yang kerap terjadi disebabkan oleh tata kelola kelembagaan yang masih buruk. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menekan tindakan yang merugikan tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu merancang, membentuk, dan menerapkan mekanisme untuk mencegah tindakan korupsi. Mekanisme tersebut yaitu sistem manajemen anti penyyuapan atau juga dikenal sebagai kebijakan anti korupsi.

Pengungkapan kebijakan anti korupsi adalah salah satu pengungkapan sosial dan lingkungan yang diambil oleh organisasi di seluruh dunia (KPMG, 2013). Kebijakan anti korupsi memberikan gambaran bahwa perusahaan sangat memperhatikan kondisi atau lingkungan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan yang memilih mengungkapkan kebijakan anti korupsi dipandang sebagai perusahaan yang memperhatikan transparansinya. Adanya kebijakan anti korupsi juga mampu memberikan gambaran mengenai keberlangsungan usaha sebuah perusahaan. Perusahaan yang di dalamnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka diharapkan mampu untuk melangsungkan keberlanjutan usahanya. Data dari (BPS, 2021) menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia dari 2017 hingga 2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada 2017 IPAK di Indonesia sebesar 3,71, kemudian pada 2018 mengalami penurunan menjadi 2,66, pada 2019 mengalami kenaikan menjadi 3,7, pada 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,84, lalu pada 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 3,88. Nilai IPAK tersebut mengartikan bahwa kesadaran akan perilaku anti korupsi juga meningkat. IPAK memiliki rentang skala 0 hingga 5, artinya jika nilai indeks semakin mendekati angka 5 maka masyarakat sadar akan tindakan anti korupsi dan semakin berperilaku anti terhadap korupsi begitu pula sebaliknya.

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan kebijakan anti korupsi menjadi hal penting dalam dunia akuntansi khususnya bagi para akuntan, dikarenakan salah satu fungsi akuntan yaitu melakukan fungsi kontrol. Akuntan mendorong fungsi kontrol dalam perusahaan untuk memastikan perusahaan

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja yang tepat. Laporan keuangan akan menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya, sehingga memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Studi empiris yang telah diteliti sebelumnya menemukan faktor-faktor yang diduga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Perusahaan besar dianggap memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengungkapan. Argumen tersebut didukung oleh penelitian (Faisal *et al.*, 2021). Kontradiksi dengan (Vale dan Branco, 2019) dimana ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan anti korupsi. Kemudian perusahaan dengan tipe industri berisiko tinggi juga terdorong untuk melakukan pengungkapan karena ingin menunjukkan pencegahan terhadap korupsi. Pernyataan tersebut didukung oleh (Faisal *et al.*, 2021), namun penelitian (Vale dan Branco, 2019) menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Tujuan penelitian ini yaitu melakukan pengujian kembali faktor-faktor lain yang diduga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan korupsi, terutama dari faktor tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan. Penelitian ini juga menambahkan variabel lain yaitu keberadaan komite tata kelola. Pengaruh keberadaan komite tata kelola terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi masih jarang diteliti sebelumnya. Perusahaan yang mempunyai komite tata kelola dianggap memiliki keseriusan untuk menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, sehingga transparansi laporan keuangan juga semakin baik.

Penelitian menggunakan teori legitimasi. Fokus teori ini berada pada hubungan organisasi dengan masyarakat, sehingga dijelaskan bahwa organisasi akan terus mencoba untuk memastikan bahwa organisasi telah melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Deegan *et al.*, 2002). Batasan dan norma-norma ini bersifat dinamis, maka dari itu perubahan terjadi dari waktu ke waktu (Lindblom, 1994). Perubahan tersebut akan menyebabkan organisasi bertindak secara responsif terhadap lingkungan di sekitarnya. Organisasi mendapat legitimasi apabila terdapat kesamaan atau kesesuaian hasil dari apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Usaha perusahaan yang dilakukan yaitu dengan tanggung jawab sosial sebagai refleksi dari bentuk perhatian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Selain dari sisi kinerja perusahaan, faktor lain yang menentukan keberlangsungan usaha yaitu legitimasi dari masyarakat. Bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan legitimasi yaitu dengan cara memperhatikan etika dalam berbisnis, mengembangkan kinerja karyawan, memperhatikan dampak lingkungan dan melakukan tanggung jawab sosial. Legitimasi ini akan berdampak baik dalam jangka panjang bagi perusahaan.

Berhubungan dengan teori legitimasi dimana pandangan dan pengakuan publik sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan menganggap pandangan dan pengakuan publik sebagai dorongan utama untuk mengungkapkan informasi lingkungan. Perusahaan menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk menunjukkan

bahwa perusahaan mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Cho dan Patten, 2007).

Pengungkapan sosial harus dianggap sebagai cara untuk memuaskan kepentingan dari pemangku kepentingan, karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan memiliki insentif untuk menggunakan strategi komunikasi termasuk pengungkapan dalam laporan keuangan guna mempengaruhi persepsi masyarakat, dan ketika proses komunikasi ini dikelola dengan tepat maka mendukung tanggapan pemangku kepentingan yang positif (Etxeberria dan Odriozola, 2018). Kemudian diharapkan memperoleh atau mempertahankan legitimasi masyarakat. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini karena ingin menginvestigasi pengungkapan informasi non keuangan (termasuk pengungkapan kebijakan anti korupsi) yang dilaksanakan perusahaan sebagai usaha penerimaan dari masyarakat (Hadjoh dan Sukartha, 2013)

Tata kelola dengan jelas mengatur seluruh aktivitas perusahaan, sehingga dapat menghindari tindakan-tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik minimal mempunyai empat organ tata kelola guna menunjang implementasi dari tata kelola (Agoes dan Ardana, 2011). Ketika perusahaan memiliki organ tata kelola tambahan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah berusaha dalam implementasi tata kelola yang baik. Penambahan tersebut dilihat dari adanya komite tata kelola dalam struktur organisasi.

Berkaitan dengan teori legitimasi, keberadaan komite tata kelola menunjukkan upaya yang dilaksanakan perusahaan kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki komitmen yang penuh untuk menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan menerima citra positif dari masyarakat dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Komite tata kelola akan memberikan bantuan kepada dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pengguna laporan keuangan dengan mengembangkan dan merekomendasikan seperangkat tata kelola untuk diterapkan dalam perusahaan. Ketika penerapan tata kelola perusahaan baik, maka masalah-masalah akuntansi atau tindak kecurangan akan cepat dideteksi. Alhasil tindakan tidak etis dapat dicegah atau ditekan. Salah satu peran dan fungsi dari komite tata kelola yaitu mengkaji kebijakan tata kelola yang berupa kebijakan anti korupsi, sehingga ketika perusahaan memiliki komite tata kelola maka akan meningkatkan transparansi dan mendorong perusahaan untuk cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Hartomo dan Silvia, 2019) menunjukkan hasil dimana keberadaan komite tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Sejalan dengan hasil penelitian dari (Malau, 2017) dan (Nasir *et al.*, 2014) dimana komite tata kelola mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Berlandaskan teori dan argumen tersebut, korelasi antara keberadaan komite tata kelola dan pengungkapan kebijakan anti korupsi dihipotesiskan sebagai berikut.

H₁: Keberadaan komite tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi.

Berdasarkan risiko industrinya, perusahaan dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu perusahaan dengan risiko rendah (*low profile*) dan perusahaan dengan risiko tinggi (*high profile*). Perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi sesuai dengan karakteristik industrinya (Dye dan Sridhar, 1995). Berkaitan dengan teori legitimasi, ketika membandingkan perusahaan yang memiliki risiko tinggi dengan perusahaan berisiko rendah maka akan ditemukan perbedaan dari sisi perhatian masyarakat. Masyarakat akan memberikan perhatian yang lebih pada perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi daripada perusahaan berisiko rendah (Roberts, 1992).

Perusahaan yang berisiko rendah memiliki visibilitas konsumen yang lebih rendah pula, sehingga risiko perusahaan cenderung lebih rendah (Roberts, 1992). Perusahaan yang berisiko tinggi akan lebih memperhatikan tindakan pencegahan korupsi, dikarenakan tidak ingin terlibat korupsi (Hartomo dan Silvia, 2019), sehingga memiliki motivasi untuk mengungkapkan anti korupsi dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

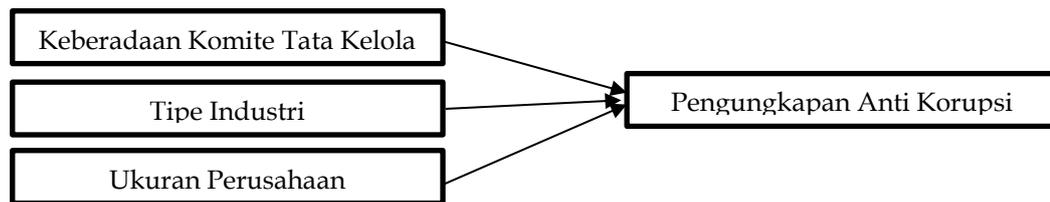
Penelitian (Rankin *et al.*, 2011) menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang termasuk dalam industri pertambangan dan energi memberikan informasi CSR yang lebih kredibel dan konsisten. Didukung oleh penelitian dari (Faisal *et al.*, 2021) dan (Odriozola dan Etxeberria, 2021) yang menjelaskan bahwa tipe industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Berlandaskan teori dan argumen tersebut, korelasi antara tipe industri dan pengungkapan kebijakan anti korupsi dinyatakan sebagai berikut.

H₂: Tipe industri memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi

Saat ukuran perusahaan semakin besar, maka semakin besar juga jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan perusahaan dan memiliki harapan yang tinggi terhadap praktik CSR (Hackstone dan Milne, 1996). Akibatnya, tekanan dari pemangku kepentingan juga lebih tinggi. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Wujud dari upaya perusahaan untuk memenuhi tuntutan tersebut yaitu dengan mengungkapkan tindakan anti korupsi. Kebijakan anti korupsi merupakan mekanisme yang dapat diupayakan oleh perusahaan untuk mengurangi tekanan tersebut.

Berkaitan dengan teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat dan mendapatkan legitimasi. Diasumsikan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi biaya yang terkait dengan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Dengan asumsi ini maka perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil, sehingga perusahaan tersebut dianggap lebih tanggap dalam memenuhi tuntutan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Di sisi lain, perusahaan besar cenderung mempublikasikan kegiatan sosialnya (Faisal *et al.*, 2018 ; (Joseph *et al.*, 2019). Berlandaskan teori dan argumen tersebut, korelasi antara ukuran perusahaan dan pengungkapan kebijakan anti korupsi dinyatakan sebagai berikut.

H₃: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Populasi merupakan seluruh data penelitian yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini mempunyai populasi berupa seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Secara lebih rinci, penentuan sampel dapat dilihat dalam tabel 1. Sampel akhir yang digunakan guna pengujian hipotesis sebanyak 2230.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	2017	2018	2019	2020	2021	Σ
Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017 hingga 2021	562	619	669	713	767	3330
Data tidak tersedia (Laporan tahunan tidak tersedia)	(173)	(169)	(262)	(259)	(237)	(1100)
Total sampel	389	450	407	454	530	2230

Sumber: Data Penelitian, 2022

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian yang digunakan yaitu laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017 hingga 2021. Sumber data seperti total asset untuk ukuran perusahaan didapatkan dari *Bloomberg* dan data seperti keberadaan komite tata kelola serta tipe industri website BEI yaitu www.idx.co.id

Kebijakan anti korupsi adalah kebijakan yang dirancang untuk mendeteksi tindak kecurangan seperti korupsi di sebuah organisasi (Joseph *et al.*, 2016). Pengukuran pengungkapan kebijakan anti korupsi dalam penelitian ini diproksikan dengan variabel *dummy* 0 dan 1 (Odriozola dan Etxeberria, 2021). 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi pada laporan tahunan dan 1 jika perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi pada laporan tahunan.

Komite tata kelola adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas secara khusus untuk mengkaji tata kelola. Pengukuran variabel keberadaan komite tata kelola diproksikan dengan *dummy* 0 dan 1 (Hartomo dan Silvia, 2019). 0 jika perusahaan tidak memiliki komite tata kelola dan 1 jika memiliki komite tata kelola.

Tipe industri yaitu penggolongan industri perusahaan berdasarkan risikonya. Pengukuran tipe industri dalam penelitian ini diproksikan dengan variabel *dummy* 0 dan 1 (Faisal *et al.*, 2018).

0 : Jika perusahaan termasuk dalam katagori *low profile*.

1 : Jika perusahaan termasuk dalam katagori *high profile*.

Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset atau penjualan (Nguyen, 2020). Pengukuran ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma total aset (Faisal *et al.*, 2018).

Penelitian menggunakan teknik *Structural Equation Modeling* yang berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS). Joseph (*et al.*, 2017) menjelaskan bahwa SEM-PLS dapat digunakan pada variabel endogen dengan pengukuran data kategorikal, sehingga dalam penelitian ini alat analisis SEM-PLS dapat digunakan.

Software yang digunakan adalah *SmartPLS* versi 3.0. Penggunaan analisis SEM-PLS dalam penelitian ini dikarenakan SEM-PLS memiliki efisiensi dan keunggulan daripada teknik analisis lainnya yaitu menggunakan pendekatan distribusi bebas (tidak berdasarkan asumsi) (Ghozali, 2008). *SmartPLS* dirancang untuk melakukan analisis terhadap variabel laten (primer) yang menggunakan indikator konstruk, namun penggunaan *SmartPLS* juga dapat diaplikasikan untuk model regresi dan analisis jalur dengan penggunaan variabel *observed* (sekunder) (Ghozali dan Latan, 2015).

Analisis statistik deskriptif menggambar deskripsi data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean*, standar deviasi dari masing-masing variabel (Ghozali dan Latan, 2015). Analisis pengukuran *outer model* menggunakan kriteria-kriteria seperti *Average Variance Extracted* (AVE), *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Analisis pengukuran *inner model* menggunakan kriteria-kriteria seperti *R-square*, *Q-square*, dan *F-square*. Langkah-langkah dalam penelitian ini dimulai dari membuat model algoritma PLS, selanjutnya *bootstrap* dan tidak memerlukan uji normalitas dalam pengujiannya.

Penelitian menggunakan *outer model* dan *inner model* dengan persamaan sebagai berikut.

Outer model:

Variabel laten eksogen (variabel independen)

Keberadaan komite tata kelola

$$X_1 = \lambda X_1 \xi_1 + \delta_1 \dots \dots \dots (1)$$

Tipe industri

$$X_2 = \lambda X_2 \xi_2 + \delta_2 \dots \dots \dots (2)$$

Ukuran perusahaan

$$X_3 = \lambda X_3 \xi_3 + \delta_3 \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

λX_1 : Outer loading keberadaan komite tata kelola

λX_2 : Outer loading tipe industri

λX_3 : Outer loading ukuran perusahaan

ξ_1 : Keberadaan komite tata kelola

ξ_2 : Tipe industri

ξ_3 : Ukuran perusahaan

δ_1 : Noise variabel keberadaan komite tata kelola

δ_2 : Noise variabel tipe industri

δ_3 : Noise variabel ukuran perusahaan

Variabel laten endogen (variabel dependen)

Kebijakan anti korupsi (Y)

Inner model:

$$KAK = \gamma_1 \xi_1 + \gamma_2 \xi_2 + \gamma_3 \xi_3 + \varsigma \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

- KAK : Kebijakan anti korupsi
- γ_1 : Koefisien jalur keberadaan komite tata kelola
- γ_2 : Koefisien jalur tipe industri
- γ_3 : Koefisien ukuran perusahaan
- ξ_1 : Keberadaan komite tata kelola
- ξ_2 : Tipe industri
- ξ_3 : Ukuran perusahaan
- ξ : Residual

Penarikan kesimpulan untuk penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi dan arah masing-masing variabel eksogen (independen), terdukung secara statistik apabila nilai $H_1, H_2,$ dan H_3 koefisiennya memiliki arah positif serta nilai koefisiennya signifikan secara statistic dengan nilai *p-value* kurang dari 0,05 (5%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat deskripsi dari masing-masing variabel di penelitian ini. Statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar devisiasi. Sampel yang diolah sebanyak 2230 perusahaan dari tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2. Statistik deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Standar Deviasi
KAK	2230	0	1	0,685	0,464
KOM TATA	2230	0	1	0,124	0,33
TYPE	2230	0	1	0,437	0,496
SIZE	2230	16,71	35,08	27,502	3,761

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel Kebijakan Anti Korupsi (KAK), komite tata kelola, tipe industri (TYPE), dan ukuran perusahaan (SIZE). Variabel KAK diukur dengan variabel *dummy* 0 dan 1. Dengan demikian nilai minimum 0 menandakan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan tidak ditemukan pengungkapan kebijakan anti korupsi dan nilai maksimum 1 menandakan bahwa dalam laporan tahunan telah diungkapkan kebijakan anti korupsi, kemudian nilai *mean* sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% perusahaan telah mengungkapkan kebijakan anti korupsi dalam laporan tahunan. Standar deviasi KAK sebesar 0,464.

Variabel KOM TATA diukur dengan variabel *dummy* 0 dan 1. Nilai minimum 0 mengartikan bahwa perusahaan tidak membentuk komite tata kelola dan nilai maksimum 1 mengartikan bahwa perusahaan telah membentuk komite tata kelola, serta nilai *mean* sebesar 0,124 yang menunjukkan bahwa 12,4% perusahaan memiliki komite tata kelola. Komite tata kelola masih bersifat sukarela, sehingga tidak semua perusahaan memiliki komite ini Standar deviasi KOM TATA sebesar 0,33.

Variabel TYPE diukur dengan variabel *dummy* 0 dan 1. TYPE memiliki nilai minimum 0 yang menandakan bahwa perusahaan tergolong dalam industri *low risk* dan nilai maksimum 1 yang menandakan perusahaan tergolong industri *high*

risk, serta nilai *mean* sebesar 0,437 yang menunjukkan bahwa 43,7% perusahaan tergolong dalam *industri high risk*. Standar deviasi TYPE sebesar 0,496.

Variabel SIZE diukur dengan logaritma natural total aset. Nilai minimum SIZE sebesar 16,71 (PT KARW Tbk tahun 2021), nilai maksimum SIZE sebesar 35,08 (PT. BMRI Tbk tahun 2021) dan *mean* sebesar 27,50. Standar deviasi SIZE sebesar 3,761.

Tabel 3. Convergen Validity

	KAK	KOM TATA	SIZE	TIPE
KAK	1,000			
KOM TATA		1,000		
SIZE			1,000	
TYPE				1,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 3 terdapat nilai *outer loadings* sebesar $1 > 0,70$. Nilai ini dapat diartikan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai validitas konvergen yang baik, maka syarat untuk validitas konvergen telah terpenuhi.

Tabel 4. Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
KAK	1,000
KOM TATA	1,000
TYPE	1,000
SIZE	1,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 4 menunjukkan nilai pengukuran *average variance extracted* (AVE) sebesar $1 > 0,50$. Nilai ini dapat diartikan bahwa semua konstruk dikatakan baik, sehingga memenuhi syarat.

Tabel 5. Discriminant Validity

	KAK	KTK	SIZE	TYPE
KAK	1,000	0,179	0,163	-0,012
KOM TATA	0,179	1,000	0,116	-0,113
SIZE	0,163	0,116	1,000	-0,292
TYPE	-0,012	-0,113	-0,292	1,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai masing-masing konstruk beserta indikatornya memiliki nilai *cross loading* yang lebih tinggi dari konstruk lainnya. Dapat diartikan bahwa konstruk laten memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik dari masing-masing yang menjadi indikatornya dibandingkan indikator dari konstruk lainnya. Konstruk laten KAK memiliki nilai lebih besar ketika diukur dengan pengkategorian mengungkap dan tidak mengungkap dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga membuktikan bahwa konstruk KAK telah memenuhi syarat *discriminant validity*.

Konstruk laten KOM TATA memiliki nilai lebih besar ketika diukur dengan pengkategorian memiliki komite dan tidak memiliki komite dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga membuktikan bahwa konstruk KOM TATA telah memenuhi syarat *discriminant validity*. Konstruk laten TYPE memiliki nilai lebih besar ketika diukur dengan pengkategorian *low risk* dan *high risk* dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga membuktikan bahwa konstruk TYPE telah memenuhi syarat *discriminant validity*.

Konstruk laten SIZE memiliki nilai lebih besar ketika diukur dengan logaritma natural total aset dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga membuktikan bahwa konstruk SIZE telah memenuhi syarat *discriminant validity*.

Tabel 6. Composite Reability

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
KAK	1,000	1,000
KTK	1,000	1,000
SIZE	1,000	1,000
TIPE	1,000	1,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 6 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reability* masing-masing variabel sebesar $1 > 0,70$. Dapat diartikan bahwa setiap konstruk baik, sehingga memenuhi syarat.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi R-Square

	R Square	R Square Adjusted
KAK	0,055	0,054

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R Square Adjusted sebesar 0,054. Dapat diartikan bahwa variabel eksogen mampu menerangkan variabel endogen sebesar 5,4%, kemudian sisanya 94,6% dijelaskan oleh variabel eksogen lain di luar model penelitian.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi F-Square

	KAK
KAK	
KOM TATA	0,029
SIZE	0,025
TYPE	0,027

Sumber: Data Penelitian, 2022

F-Square adalah perubahan *R-Square* ketika variabel eksogen dikeluarkan dari model. Tabel 8 menunjukkan bahwa masing-masing nilai *F-Square* $> 0,02$. Nilai 0,02 tergolong dalam katagori lemah atau kecil. Uji Koefisien Determinasi *Q-Square*. Agar sesuai dengan kriteria, nilai *q-square* harus bernilai positif atau melebihi nilai nol dan tidak bernilai negatif.

$$Q\text{-Square} = 1 - (1 - R^2)$$

$$Q\text{-Square} = 1 - (1 - 0,055)$$

$$Q\text{-Square} = 1 - 0,945$$

$$Q\text{-Square} = 0,003025$$

Tabel 9 Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
KTK -> KAK	0,167	0,165	0,015	11,278	0,000	Diterima
SIZE -> KAK	0,160	0,159	0,021	7,740	0,000	Diterima
TIPE -> KAK	0,054	0,052	0,023	2,339	0,020	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan perhitungan *Q-Square*, diperoleh nilai $0,003025 > 0$. Dapat diartikan bahwa *Goodness of Fit* telah terpenuhi. Pengambilan kesimpulan dari pengujian hipotesis diketahui dari nilai signifikansi. Variabel independen memiliki pengaruh signifikan jika nilai signifikansi $< 0,05$. Berikut hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 9.

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa variabel keberadaan komite tata kelola memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 dan bernilai positif, artinya hipotesis pertama diterima dan terdukung secara statistik. Tata kelola perusahaan yang baik minimal mempunyai empat organ tata kelola guna menunjang implementasi dari tata kelola (Agoes dan Ardana, 2011). Berkaitan dengan teori legitimasi, keberadaan komite tata kelola menunjukkan upaya yang dilaksanakan perusahaan kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki komitmen yang penuh untuk menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan menerima citra positif dari masyarakat dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Komite tata kelola perusahaan akan memberikan bantuan kepada dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pengguna laporan keuangan dengan mengembangkan dan merekomendasikan seperangkat tata kelola untuk diterapkan dalam perusahaan. Salah satu peran dan fungsi dari komite tata kelola yaitu mengkaji kebijakan tata kelola yang berupa kebijakan anti korupsi, sehingga ketika perusahaan memiliki komite tata kelola maka akan meningkatkan transparansi dan mendorong perusahaan untuk cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Konsisten dengan penelitian dari (Hartomo dan Silvia, 2019) menunjukkan hasil bahwa keberadaan komite tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Sejalan dengan penelitian dari (Malau, 2017) dan (Nasir *et al.*, 2014) yang menunjukkan bahwa komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan.

Variabel tipe industri memiliki signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 dan bernilai positif, artinya hipotesis kedua diterima dan terdukung secara statistik. Perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi sesuai dengan karakteristik industrinya (Dye dan Sridhar, 1995). Berkaitan dengan teori legitimasi, ketika membandingkan perusahaan yang memiliki risiko tinggi dengan perusahaan berisiko rendah maka akan ditemukan perbedaan dari sisi perhatian masyarakat. Masyarakat akan memberikan perhatian yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi dibandingkan dengan perusahaan berisiko rendah (Roberts, 1992). Perusahaan yang berisiko rendah memiliki visibilitas konsumen yang lebih rendah pula, sehingga risiko perusahaan cenderung lebih rendah (Roberts, 1992). Perusahaan yang berisiko tinggi akan lebih memperhatikan tindakan pencegahan korupsi, dikarenakan tidak ingin terlibat korupsi (Hartomo dan Silvia, 2019), sehingga memiliki motivasi untuk mengungkapkan anti korupsi dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh (Rankin *et al.*, 2011) dimana perusahaan yang termasuk dalam industri pertambangan dan energi memberikan informasi CSR yang lebih kredibel dan konsisten. Didukung oleh penelitian dari (Faisal *et al.*, 2021) dan (Odriozola dan Etxeberria, 2021) yang menjelaskan bahwa tipe industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

Variabel ukuran perusahaan memiliki signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari alpha 0,05 dan bernilai positif, artinya hipotesis ketiga diterima dan terdukung secara statistik. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan perusahaan dan memiliki harapan yang tinggi terhadap praktik CSR (Hackstone dan Milne, 1996). Wujud dari upaya perusahaan untuk memenuhi tuntutan tersebut yaitu dengan mengungkapkan tindakan anti korupsi. Kebijakan anti korupsi merupakan mekanisme yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi tekanan tersebut. Berkaitan dengan teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat dan mendapatkan legitimasi. Diasumsikan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi biaya yang terkait dengan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Dengan asumsi ini maka perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar dianggap lebih tanggap dalam memenuhi tuntutan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Sejalan dengan penelitian dari (Faisal *et al.*, 2018 dan (Joseph *et al.*, 2019) dimana perusahaan besar cenderung mempublikasikan kegiatan sosialnya.

SIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkaitan dengan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Tujuannya untuk mengetahui apakah keberadaan komite tata kelola perusahaan, tipe industri, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Kontribusi penelitian yang berupa penambahan variabel keberadaan komite tata kelola terdukung secara statistik, sehingga kesimpulan penelitian yang didapat diambil yaitu perusahaan yang memiliki komite tata kelola lebih besar kecenderungannya untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi, perusahaan dengan tipe industri *high risk* lebih besar kecenderungannya untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi, dan ukuran perusahaan yang semakin besar maka lebih besar kecenderungannya untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Penelitian ini terbatas pada nilai *R-Square* yang rendah, nilai *F-Square* yang tergolong lemah dan nilai *Q-Square* yang kecil. Saran bagi penelitian berikutnya yaitu menambahkan variabel independen lain seperti kebebasan pers.

REFERENSI

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi : Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya* (Revisi). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- BPS. (2021). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkatkan Dibandingkan IPAK 2020. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2021-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html>
- Cho, C. H., & Patten, D. M. (2007). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 32(7-8), 639-647. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.09.009>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy

- theory. In *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 15).
<https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Dye, R. A., & Sridhar, S. S. (1995). Industry-Wide Disclosure Dynamics. *Journal of Accounting Research*, 33(1), 157. <https://doi.org/10.2307/2491297>
- Ettxeberria, I. A., & Odriozola, M. A. (2018). The social reputation of European companies: Does anti-corruption disclosure affect stakeholders' perceptions? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(5), 713–721. <https://doi.org/10.1002/csr.1488>
- Faisal, F., Andiningtyas, E. D., Achmad, T., Haryanto, H., & Meiranto, W. (2018). The content and determinants of greenhouse gas emission disclosure: Evidence from Indonesian companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(6), 1397–1406. <https://doi.org/10.1002/csr.1660>
- Faisal, F., Joseph, C., Saputri, A., & Prastiwi, A. (2021). The content and determinants of CSR anti-corruption disclosure: the case of public-listed companies in Indonesia. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0155>
- Ghozali, I. (2008). *Pemodelan Persamaan Struktural, Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hackston, D., & Milne, Markus, J. (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77–108.
- Hadjoh, R. A., & Sukartha, I. M. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan Eksposur Media Pada Pengungkapan Informasi Lingkungan. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Hartomo, O. D., & Silvia, B. M. (2019). Antecedents of Disclosure of Anti-Corruption Policy in Indonesian Companies. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2919>
- Joseph, C., Gunawan, J., Madi, N., Janggu, T., Rahmat, M., & Mohamed, N. (2019). Realising sustainable development goals via online integrity framework disclosure: Evidence from Malaysian and Indonesian local authorities. *Journal of Cleaner Production*, 215, 112–122. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.057>
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., & Avelind Noyem, J. (2016). A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Joseph F. Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). In *International Journal of Research & Method in Education* (Vol. 38). <https://doi.org/10.1080/1743727x.2015.1005806>
- KPK. (2019). Graph TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.
- KPK. (2022). Mengenal Pengertian Korupsi. Retrieved from

- <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null>
KPMG. (2013). No Title. Retrieved from
<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/12/corporate-responsibility-reporting-survey-2013.pdf>
- Lindblom, C. . (1994). "The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure", *Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, NY.*"
- Malau, M. (2017). Analisis Tata Kelola Jaminan Eksternal, Karakteristik Perusahaan dan Kebangkrutan Terhadap Laporan Keberlanjutan. *Foundamental Management Journal*, 2(2), 47-55.
- Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar. *Jurnal Ekonomi, Volume 22.*
- Nguyen, T. D. (2020). Does firm growth increase corruption? Evidence from an instrumental variable approach. *Small Business Economics*, 55(1), 237-256. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00160-x>
- Odriozola, M. A., & Etxeberria, I. Á. (2021). Determinants of corporate anti-corruption disclosure: The case of the emerging economics. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063462>
- Rankin, M., Windsor, C., & Wahyuni, D. (2011). An investigation of voluntary corporate greenhouse gas emissions reporting in a market governance system: Australian evidence. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 24(8), 1037-1070. <https://doi.org/10.1108/09513571111184751>
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory. *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595-612. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90015-K](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90015-K)
- Vale, J., & Branco, M. C. (2019). Anti-corruption reporting in emerging country multinationals. *Journal of Financial Crime*, 26(3), 861-873. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0114>